

**PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENERIMAAN BEA MASUK UNTUK
KAWASAN BERIKAT
(STUDI KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
BEKASI)**

Adhitya Alfani¹, Amrie Firmansyah²
email: amrie.firmansyah@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[2018-09-04]

Revisi
[2018-10-24]

Tanggal diterima
[2019-02-11]

ABSTRACT

This study aims to evaluate internal control in the import duty cycle that focuses on the procedure for receipt of import duties on customs services for Bonded Zones. This study uses a case study of the Customs and Excise Supervision and Service Office of Bekasi, where most of its activities carry out customs, excise services for bonded zones, and are one of the offices that serve customs services and supervision in the largest Bonded Zones in Indonesia. This study used descriptive qualitative methods and was conducted during the February period. July 2016. The results of the study show that in general, the application of the import service system for BC 2.5 documents within the KPPBC Bekasi has good related internal controls which include general control and application control. However, there are still weaknesses in employee placement system, employee skills, especially in very important parts, data reconciliation, and manual database updates can result in reduced data accuracy.

Keywords: customs duties, internal control, revenue cycle.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal pada siklus penerimaan bea masuk yang berfokus pada prosedur penerimaan bea masuk untuk Kawasan Berikat termasuk. Penelitian ini menggunakan studi kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi yang sebagian besar kegiatannya melakukan pelayanan kepabeanan dan cukai untuk kawasan berikat dan merupakan salah satu kantor yang melayani pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan untuk Kawasan Berikat terbesar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dilakukan selama periode Februari s.d. Juli 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya penerapan sistem pelayanan impor dokumen BC 2.5 di lingkungan KPPBC Bekasi sudah memiliki pengendalian internal yang baik terkait yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Namun, masih terdapat kelemahan terkait dengan sistem penempatan pegawai, kecakapan pegawai khususnya di bagian-bagian yang sangat penting, rekonsiliasi data dan *update data base* yang masih manual dapat mengakibatkan tingkat akurasi data menjadi berkurang.

Kata Kunci: bea masuk, pengendalian internal, siklus penerimaan.

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN

² Politeknik Keuangan Negara STAN

1. Latar Belakang

Sistem merupakan sekelompok unsur yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang terdiri dari beberapa subsistem yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri untuk membantu sistem yang lebih besar yang bersangkutan, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu Romney dan Steinbart (2016). Saat ini, aktivitas dalam suatu organisasi tidak terlepas dari sistem informasi yang merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk semua pihak dalam organisasi kapanpun diperlukan (Daud dan Windana, 2014). Sementara itu, sistem informasi yang terkait dengan fungsi akuntansi dinamakan dengan sistem informasi akuntansi (Daud dan Windana, 2014). Sistem informasi akuntansi diharapkan dapat dilaksanakan oleh suatu organisasi dari aktivitas-aktivitas terkait dengan fungsi akuntansi dengan baik dan akuntabel. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu terdapat peran pengendalian internal yang baik. Menurut Sukadwilinda dan Ratnawati (2013), pengendalian internal merupakan suatu proses dalam suatu organisasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu dengan melibatkan sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh pengendalian internal yang baik. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk sektor komersial maupun sektor publik atau sektor pemerintah dengan tujuan masing-masing sektor.

Di sektor pemerintahan, terdapat fungsi penerimaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan organisasi di bawah Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DJBC tidak bisa terlepas dari sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Rencana Strategis DJBC tahun 2015-2019, disebutkan bahwa DJBC dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai *revenue collector*, *community protector*, *trade facilitator*, dan *industrial assistance*

(DJBC, 2015). Penelitian ini hanya menekankan fungsi *revenue collector* dan *industrial assistance*. Fungsi *revenue collector* terkait dengan pemungutan bea masuk yang bukan hanya berasal dari bandara atau pelabuhan saja, melainkan dapat berasal dari kawasan berikat. Penerimaan bea masuk sangat penting bagi negara walaupun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan perpajakan. Sementara itu, *industrial assistance* memiliki arti turut menunjang kelancaran aktivitas industri dalam negeri sehingga terciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi di dalam negeri. Dari fungsi keduanya, penelitian ini selanjutnya menyoroti kebijakan di bidang kepabeanan atas fasilitas Kawasan Berikat.

Kawasan Berikat merupakan bangunan, tempat, atau kawasan tertentu yang yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor (Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015). Dengan demikian, apabila perusahaan atau pengusaha pada kawasan berikat tersebut melakukan aktivitas produksi dan menjual produknya ke Tempat Luar Dalam Daerah Pabean (TLDDP), maka produk tersebut dikenakan bea masuk jika barang yang dikeluarkan tersebut memiliki tarif bea masuk lebih dari 0 (nol) persen. DJBC memfasilitasi penjualan atau pengeluaran barang impor tersebut dari kawasan berikat dengan dokumen impor BC 2.5. Salah satu fungsi dari dokumen impor BC 2.5 ini adalah sebagai penerimaan negara di sisi pajak yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan oleh perusahaan. Jumlah penerimaan negara yang dilaporkan oleh pengguna jasa akan diteliti dokumennya oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Apabila terdapat kekurangan pembayaran maka pengguna jasa harus membayar kekurangannya atau denda.

Penelitian yang mengulas pengendalian internal telah dilakukan oleh Kholidah dan Widyawati (2017) dengan menggunakan objek organisasi sektor bisnis. Penelitian tersebut melakukan evaluasi sistem informasi akuntansi penjualan. Yuniati (2017) melakukan penelitian pengendalian internal di sektor pemerintah yang menguji pengaruh pengendalian internal terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sementara itu, dengan menggunakan objek kepabeanan dan cukai, Hayati dan Karlina (2017) mengulas sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai di Indonesia yang memfokuskan pada sistem penerimaan kas saja. Sementara itu, Arief dan Daniel (2017) menguraikan keseluruhan sistem informasi terkait dengan nilai penerimaan dan piutang untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian terkait pengendalian internal pada bidang kepabeanan dan cukai sebelumnya telah dilakukan oleh Simorangkir dan Firmansyah (2017) yang mengulas prosedur pengurusan perizinan impor sementara di KPPBC Tipe Madya X mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen sampai penetapan klasifikasi barang dan penerbitan izin impor sementara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas prosedur penerimaan bea masuk pada Kawasan Berikat yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan melakukan evaluasi atas penerimaan langsung Pemerintah dari sektor kepabeanan dengan menggunakan objek Kawasan Berikat. Penelitian ini menggunakan objek KPPBC Bekasi yang merupakan salah satu kantor yang melayani pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan terbanyak untuk kawasan berikat di Indonesia. Adanya jumlah dokumen dan elemen data yang banyak dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan mengakibatkan perlunya pengendalian internal memadai yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pemrosesan

data yang dapat berdampak pada penerimaan bea masuk.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2016), siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi secara eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan pelanggan. Secara ringkas, siklus pendapatan yaitu *give goods get money* (memberikan barang dan memperoleh pembayaran). Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat pada saat yang tepat dengan harga yang sesuai. Masalah umum yang sering terjadi dalam siklus pendapatan ini menurut Romney dan Steinbart (2016) meliputi data induk yang tidak akurat atau tidak valid, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, kehilangan atau hancurnya data, serta kinerja yang buruk.

Data induk dapat berupa data induk pelanggan, data induk persediaan, atau data induk harga. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke alamat yang salah, keterlambatan dalam perolehan pembayaran karena mengirimkan faktur ke alamat yang salah, atau menjual barang kepada pelanggan yang telah melewati batas kreditnya Romney dan Steinbart (2016). Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu yang disebabkan oleh kurangnya pasokan persediaan sehingga dapat menurunkan penjualan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan atas pemenuhan pesanan tersebut. Sementara itu, kesalahan dalam data induk harga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena menerima tagihan lebih dari yang seharusnya dibayar serta pendapatan yang hilang karena melakukan

penagihan kurang dari semestinya. Di dalam siklus pendapatan, menurut Romney dan Steinbart (2016) terdapat empat aktivitas dasar, yaitu entri pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas.

Terkait dengan aktivitas-aktivitas di atas, dibutuhkan suatu pengendalian internal dengan tujuan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai (Romney dan Steinbart, 2016). Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting sebagaimana dijelaskan oleh Romney dan Steinbart (2016) yaitu pengendalian preventif mencegah masalah sebelum timbul, pengendalian detektif, menemukan masalah yang tidak terelakkan dan pengendalian korektif, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah, serta memulihkan kembali dari kesalahan yang terjadi. Romney dan Steinbart (2016) juga memisahkan pengendalian internal dalam dua kategori. Pertama, pengendalian umum (*general control*), memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Kedua, pengendalian aplikasi (*application control*), mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian internal di sektor pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Committee of Sponsoring Organization (COSO) pada tahun 1992 menerbitkan Pengendalian Internal (*Internal Control*) yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Pada tahun 2013, kerangka *Internal Control (IC)* diperbarui untuk kesepakatan yang lebih baik lagi dengan proses bisnis dan penguasaan teknologi terkini. Menurut COSO Framework, *Internal Control* terdiri dari lima komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi,

pemantauan. Kerangka pengendalian yang dikembangkan oleh COSO juga digunakan oleh pemerintah dalam menyusun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008).

2.2. Pengendalian Internal Atas Penerimaan Bea Masuk pada Kawasan Berikat di KPPBC Bekasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Sementara itu, kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Dalam arti lain Daerah Pabean di wilayah Indonesia yang tidak ditunjuk sebagai Kawasan Bebas, TPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, kawasan berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC.

Sistem aplikasi BC 2.5 merupakan sistem pelayanan dokumen impor barang dari kawasan berikat ke TLDDP (Tempat Lain dalam Daerah Pabean). Pada pelaksanaan pelayanan sistem BC 2.5 di KPPBC Bekasi tidak sepenuhnya menggunakan sistem komputerisasi. Oleh karena itu terdapat beberapa bagian dalam pelayanan dan pengawasannya yang dilakukan secara manual. Pelayanan dokumen impor BC 2.5 tidak dikenakan PNB (Pungutan Negara Bukan Pajak) akan tetapi pengguna jasa harus melunasi pungutan negara berupa pajak seperti bea masuk, PPh impor, PPN, PPnBM. Dalam pelayanan dokumen impor BC 2.5 di KPPBC Bekasi terdapat janji layanan yaitu waktu pelayanan yang dijanjikan untuk penyelesaian dokumen BC 2.5 sejak dokumen diterima oleh petugas bea dan cukai sampai dengan dikeluarkannya IP (Instruksi Pemeriksaan), SPJM (Surat

Pemberitahuan Jalur Merah), ataupun SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). Contohnya waktu penyelesaian pemeriksaan dokumen BC 2.5 sejak diterima dokumen oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai atas laporan hasil pemeriksaan diterima oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai paling lama 1 hari kerja untuk dikeluarkannya SPPB.

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan KPPBC Bekasi dalam menjalankan pelayanan dokumen BC 2.5:

1) Pengendalian terhadap sistem aplikasi BC 2.5

Pengusaha kawasan berikat atau pemohon menyerahkan *softcopy* yang berisi data BC 2.5 dan juga mengajukan dokumen fisik sebagai bentuk aktivitas pengendalian untuk memudahkan administrasi dokumen, dokumen fisik BC 2.5 yang diajukan oleh pemohon wajib menggunakan map khusus yang telah ditentukan bentuk dan warnanya sesuai jenis dokumen BC 2.5 kawasan berikat. Warna map yang digunakan adalah merah muda karena untuk warna lain seperti warna biru muda digunakan untuk dokumen BC 2.0. Pembedaan warna ini sangat berguna bagi petugas administrasi dokumen agar dokumen tersebut tidak tercampur dengan jenis dokumen lain. Sistem aplikasi BC 2.5 pada KPPBC Bekasi tidak dapat diakses oleh semua orang, hanya orang-orang yang memiliki *username* dan *password* terdaftar saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Pengendalian juga meliputi atas hak akses yang dimiliki oleh masing-masing *user*, seperti hak kepala seksi yang dapat menyetujui dokumen BC 2.5 tidak akan terdapat pada menu-menu yang dimiliki petugas penerima dokumen sehingga masing-masing pegawai bertanggungjawab atas tugas dan wewenang yang dimilikinya, hal ini akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang sepanjang masing-masing pegawai dapat menjaga kerahasiaan *username* dan *password*nya masing-masing. Sistem aplikasi BC 2.5 didesain sedemikian rupa sehingga apabila data pemohon tidak sesuai dengan

format yang ditentukan misalnya perubahan yang dilakukan oleh pemohon tidak melakukan melalui modul yang dimilikinya akan tetapi mengubah pada *file* outputnya maka data tersebut akan ditolak sehingga pengajuan dokumen tidak dapat diproses dan hasil penolakan dicetak pada kertas disertai dengan alasan penolakan tersebut.

2) Otorisasi dan pemisahan fungsi pelayanan dokumen BC 2.5

Dalam setiap proses dalam sistem pelayanan dokumen BC 2.5 setiap bagian atau seksi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Otorisasi dan pemisahan fungsi yang berbeda-beda dari pihak satu dengan pihak lainnya menjadi penting dalam kegiatan pelayanan dokumen BC 2.5 sehingga pemrosesan dokumen lebih dapat dipertanggungjawabkan.

3) Pengendalian atas fisik aset

Pengendalian fisik sangat perlu dilakukan untuk pengamanan aset negara dalam hal ini terutama terhadap pengamanan data dan kelancaran terhadap arus prosedur pelayanan dan pengawasan dokumen impor BC 2.5. Tindakan yang dilakukan oleh KPPBC Bekasi adalah melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap area dalam gedung, gudang arsip dokumen, tempat penimbunan pabean, kawasan berikat, maupun hanggar kepabeanan dan cukai. Pengamanan dan perlindungan area di gedung kantor beserta isinya seperti perangkat komputer, dokumen dan lain-lain. Pengamanan juga dilakukan dengan adanya pagar yang membatasi area kantor, adanya petugas keamanan yang berjaga 24 jam di gerbang dan di dalam kantor dan menutup semua gerbang kantor baik gerbang masuk atau gerbang keluar apabila sudah melebihi jam 9 malam. Untuk peningkatan keamanan dan penelusuran dilakukan pemasangan CCTV di dalam ruangan bangunan kantor. Pengamanan dan perlindungan atas gudang arsip dokumen dan tempat penimbunan pabean, dilakukan dengan melakukan penguncian dan melakukan pembatasan atas akses ke dalam gudang tersebut. Pengamanan

dan perlindungan atas barang-barang yang belum dipenuhi kewajibannya di kawasan berikat dilakukan dengan adanya pagar kawasan berikat yang tingginya minimal 2 (dua) meter sebagai pemisah dengan bangunan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanggar kepabeanan dan cukai juga berada di dekat pintu gerbang pada perusahaan kawasan berikat dan dilakukan pemantauan atas CCTV yang mengawasi kegiatan kawasan berikat. Pengamanan dan perlindungan hanggar kepabeanan dan cukai dilakukan dengan adanya ruangan khusus yang terpisah dari bangunan perusahaan dan dilakukan penguncian serta pembatasan akses ke dalam ruangan hanggar kepabeanan dan cukai untuk menjaga data-data atau aset yang berhubungan dengan pelayanan kepabeanan dan cukai. Pengamanan atas data atau sistem aplikasi BC 2.5 di lingkungan kerja KPPBC Bekasi berupa *server* diletakkan dalam suatu ruangan khusus, dan melakukan penguncian serta pembatasan akses atas ruangan tersebut serta dilengkapi dengan fasilitas pendingin yang memadai guna mencegah terjadinya kelebihan panas yang dapat berpotensi mengganggu jalannya proses pengolahan data dalam pelayanan kepabeanan dan cukai khususnya untuk pelayanan dokumen impor BC 2.5.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap untuk digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer karena bersumber langsung dari objek yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara dilakukan kepada 4 orang informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang pelaksana di KPPBC Bekasi. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mendapat informasi mendalam

terhadap hal-hal yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini. Wawancara dilakukan minggu ketiga Mei 2016. Adapun pemilihan informan didasarkan atas kompetensi pekerjaan dan sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya, observasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui pengamatan secara langsung terhadap praktik penerapan standar yang berlaku, penelaahan dokumen-dokumen terkait, hasil wawancara dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kondisi terkini di lapangan. Secara umum, item-item pertanyaan meliputi prosedur penerimaan bea masuk, potensi ancaman dan pengendalian internal yang telah dilakukan di KPPBC Bekasi.

4. Pembahasan

Pada wilayah kerja KPPBC Bekasi terdapat banyak perusahaan yang menggunakan fasilitas kawasan berikat sehingga kegiatan pelayanan dan pengawasan pada kawasan berikat merupakan porsi paling besar dibandingkan kegiatan kepabeanan yang lain. Dalam kegiatan pelayanan dan pengawasan Kawasan Berikat tidak terlepas dari kegiatan impor. Kegiatan impor tersebut merupakan kegiatan pengeluaran barang dari kawasan berikat ke TLDDP. Dalam kegiatan importasi tersebut, terdapat penerimaan negara dalam bentuk pajak yaitu bea masuk dan PDRI (Pajak dalam Rangka Impor) karena pada saat pemasukan barang dari luar negeri ke perusahaan kawasan berikat diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan PDRI. Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengeluaran barang hasil produksi atau sisa hasil produksi dari kawasan berikat ke TLDDP adalah dokumen impor BC 2.5 jika barang tersebut berasal dari luar negeri. Pelayanan dan pengawasan dokumen BC 2.5 menjadi sangat penting karena dokumen tersebut merupakan dasar perhitungan untuk besaran bea masuk dan PDRI yang dibayarkan oleh perusahaan kawasan berikat. Oleh karena itu pengendalian internal yang memadai sangat diperlukan untuk prosedur pelayanan dan

pengawasan dokumen impor BC 2.5. Semakin tinggi keandalan pengendalian internal yang diterapkan pada pelayanan dokumen impor BC 2.5, semakin berkurang tingkat kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan kawasan berikat maupun oknum pegawai Bea Cukai yang dapat mengakibatkan berkurangnya pungutan negara dalam bentuk pajak khususnya bea masuk. Pengendalian internal pelayanan dan pengawasan dokumen BC 2.5 pada dasarnya yang sudah diterapkan oleh KPPBC Bekasi akan tetapi diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan suatu sistem yang lebih handal untuk dapat memberikan jaminan yang lebih memadai dalam menghasilkan penerimaan negara berupa bea masuk dan PDRI yang optimal.

Menurut Romney dan Steinbart (2016) pengendalian dibagi menjadi 2 yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, hal ini sejalan dengan pengendalian internal yang diatur dalam PP 60 tahun 2008. Dengan demikian, pembahasan untuk pengendalian dalam penelitian ini dibagi ke dalam 2 jenis pengendalian tersebut yaitu

4.1. Pengendalian umum

1) Pengamanan Sistem Informasi;

Sistem informasi di KPPBC Bekasi perlu dilakukan pengembangan untuk menunjang aktivitas yang semakin berkembang akibat adanya perubahan peraturan dan perkembangan kondisi yang ada di lapangan. Pengamanan sistem pada kantor KPPBC Bekasi sudah dilakukan dengan cukup baik salah satunya adalah pemisahan fungsi berupa pembagian tanggung jawab untuk wilayah pengawasan dan pelayanan untuk masing-masing Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, sebagai contoh kepala seksi memiliki tanggung jawab pada wilayah kawasan industri MM2100 sehingga apabila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan pengeluaran barang untuk dokumen impor BC 2.5 pada wilayah tersebut maka langsung ditangani oleh Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai tersebut sehingga permasalahan akan lebih cepat diselesaikan. Pengamanan atas sistem

jaringan komputer dan aplikasi BC 2.5 untuk kantor KPPBC Bekasi dipegang oleh kepala seksi lainnya sehingga kepala seksi tersebut bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem jaringan dan sistem aplikasi impor BC 2.5 apabila terdapat permasalahan.

2) Pengendalian atas akses

Akses fisik maupun akses terhadap aplikasi dokumen impor BC 2.5 pada KPPBC Bekasi menjadi perhatian penting. Tidak semua pegawai dapat mengakses sistem aplikasi impor BC 2.5. Aplikasi BC 2.5 di KPPBC Bekasi menggunakan sistem instalasi sehingga walaupun komputer berada di jaringan kantor akan tetapi jika tidak mempunyai aplikasi BC 2.5 yang harus diinstall maka tidak dapat mengakses data BC 2.5 tersebut, berbeda dengan aplikasi dengan menggunakan basis web, aplikasi yang menggunakan basis web tidak perlu menginstall aplikasi khusus untuk mengakses data BC 2.5 akan tetapi hanya perlu menginstall browser beserta pluginnya (jika diperlukan) untuk mengakses data tersebut sehingga pengamanan untuk data BC 2.5 lebih handal.

Pengendalian akses juga diterapkan di sistem aplikasi BC 2.5 di KPPBC Bekasi dengan cara setiap pegawai harus mempunyai atau mendaftarkan user mereka untuk mendapatkan akses sistem aplikasi BC 2.5, sehingga tidak semua pegawai Bea dan Cukai dapat memakai atau mengubah data BC 2.5. Setiap akan masuk ke sistem pegawai Bea dan Cukai harus memasukkan *username* dan *password* untuk dapat mengakses aplikasi BC 2.5 tersebut. Pengendalian ini cukup penting dan tepat karena akan menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan data BC 2.5.

3) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;

Dalam penerapan sistem BC 2.5 pada tahap selanjutnya akan mengalami perubahan seperti tampilan muka, perubahan desain, perubahan kebijakan, perbaikan keamanan, atau

perubahan-perubahan lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi sistem BC 2.5 yang dimiliki KPPBC Bekasi memiliki kelemahan karena memakai sistem instalasi sehingga jika aplikasi yang dipakai mempunyai *update* terbaru maka *update* tersebut harus diinstall di setiap komputer sehingga akan mengurangi efisiensi. Jika menggunakan basis *web update* aplikasi hanya dilakukan di *server* sehingga ketika pegawai mengakses aplikasi web tersebut perbaikan atau penambahan *update* sudah dapat langsung digunakan tanpa perlu menginstall *update* di setiap komputer pegawai. Pada sistem yang berbasis aplikasi jika terdapat aplikasi yang belum diperbarui dan aplikasi yang lama tersebut terdapat kelemahan dalam segi keamanannya maka akan dapat mengancam keandalan dari data BC 2.5 untuk kantor KPPBC Bekasi.

4) Pengendalian atas sistem perangkat lunak dan perangkat keras;

Pada kantor KPPBC Bekasi semua sistem yang berbasis komputer dijaga dan dipelihara oleh Bagian Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen. Bagian ini bertugas untuk memastikan keandalan sistem jaringan komputer dan aplikasi pada KPPBC Bekasi. Sebagian sistem seperti sistem aplikasi BC 2.5 berada di ruang *server* khusus dan dilengkapi dengan pendingin yang memadai. Jika terdapat permasalahan terhadap sistem aplikasi BC 2.5 maka bagian ini bertanggung jawab terhadap perbaikan atas sistem tersebut, sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan dan mengganggu aktivitas dari perusahaan kawasan berikat yang akan melakukan impor barang. Menurut observasi yang telah dilakukan, pegawai pada bagian ini belum sepenuhnya terdiri dari orang-orang yang menguasai jaringan dan perangkat lunak secara memadai.

5) Pemisahan tugas

Pemisahan tugas menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk kelancaran kegiatan pelayanan dan pengawasan sistem BC 2.5 di KPPBC Bekasi karena pemisahan tugas dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dalam

pelaksanaannya pemisahan tugas untuk sistem BC 2.5 dibagi menjadi petugas penerima dokumen yang bertugas menerima dokumen serta memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen, petugas pengecekan penerimaan negara yang bertugas memastikan penerimaan negara sudah diterima, jumlah, serta kelengkapan dokumen bukti penerimaan negara telah dilengkapi sesuai dengan pemberitahuan dokumen impor, petugas pengecekan kelengkapan barang larangan dan pembatasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen larangan dan pembatasan, petugas penomoran dokumen dan penyaluran dokumen yang mempunyai tanggung jawab atas kelancaran administrasi dokumen impor BC 2.5 di lingkungan KPPBC Bekasi, petugas pemeriksa dokumen yang bertugas dalam memeriksa kebenaran data dalam pemberitahuan impor serta memeriksa jumlah pungutan negara yang seharusnya diterima di kas umum negara, petugas bagian arsip yang mempunyai peran dalam penyimpanan dokumen serta pencarian dokumen yang disimpan.

4.2. Pengendalian Aplikasi

1). Pengendalian otorisasi;

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi material yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan tujuan organisasi. Otorisasi diperlukan untuk memberikan jaminan yang memadai atas keandalan dalam pelayanan kepabeanan dan cukai di lingkungan KPPBC Bekasi. Setiap bagian mempunyai tugas dan wewenang yang khusus dalam menjalankan pelayanan dan pengawasan terhadap dokumen impor BC 2.5. Pada sistem aplikasi BC 2.5 telah didesain sedemikian rupa sehingga tampilan muka pada masing-masing *user* atau bagian memiliki tampilan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Setiap pegawai bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatannya seperti input, mengubah, atau menghapus data karena segala kegiatan yang dilakukan pada aplikasi tersebut ada rekam jejaknya sesuai dengan nama masing-masing

pegawai. Otorisasi yang dilakukan oleh bagian-bagian pada sistem pelayanan dokumen BC 2.5 meliputi otorisasi petugas penerima dokumen, otorisasi petugas pengecekan penerimaan negara, otorisasi petugas pengecekan kelengkapan barang larangan dan pembatasan, otorisasi petugas pemeriksa dokumen, otorisasi petugas bagian arsip. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan informasi dari informan, otorisasi-otorisasi tersebut secara umum telah berjalan dengan baik. Dari otorisasi tersebut yang sangat penting adalah dibagian otorisasi Pejabat Pemeriksa Dokumen karena proses pelayanan dokumen impor BC 2.5 terkait kebenaran tarif dan jumlah pungutan negara di periksa secara mendetail di otorisasi ini. Apabila tarif atau nilai barang tersebut berbeda dengan seharusnya maka mempunyai potensi berkurangnya pungutan negara atas impor barang tersebut.

2). Pengendalian kelengkapan

Pada aplikasi sistem BC 2.5 dalam pengentrian data atas seluruh kegiatan pelayanan dan pengawasan dokumen impor BC 2.5 sebagian besar telah memiliki otorisasi yang jelas dalam pelaksanaannya sehingga sistem BC 2.5 KPPBC Bekasi memiliki pengendalian internal dalam pengentrian data yang cukup baik untuk otorisasinya. Namun, KPPBC Bekasi sering tidak melakukan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data untuk sebagian besar kegiatan. Kegiatan rekonsiliasi hanya dilakukan pada Seksi Perbendaharaan di mana data penerimaan pungutan negara dan nomor bukti penerimaan negara BC 2.5 yang dilakukan bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk memastikan data nomor, jumlah pungutan, kelengkapannya telah diinput dengan lengkap dan benar.

3). Pengendalian akurasi

Dalam menjamin data BC 2.5 yang ada di KPPBC Bekasi telah sesuai perhitungannya, desain aplikasi entri data pada aplikasi BC 2.5 telah dibuat sedemikian rupa untuk tidak membingungkan pengguna sehingga pengentrian

data bisa lebih akurat. Apabila terdapat permasalahan dalam akurasi data maka diperlukan identifikasi atau notifikasi bahwa data salah atau kurang lengkap, misalnya data tidak bisa diinput apabila terdapat kesalahan penambahan huruf pada kolom jumlah atau kolom yang hanya diperbolehkan input angka. Pengendalian ini cukup efektif untuk menjaga akurasi data terhadap kesalahan pada kolom jumlah. Jika terjadi kesalahan pencatatan atau pelaporan maka perbaikan data yang salah harus segera dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang yaitu bagian PDAD sehingga kesalahan tersebut tidak berdampak pada pelaporan pungutan negara selanjutnya.

4). Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Untuk menjaga keandalan pemrosesan dan *file* data seharusnya program aplikasi BC 2.5 yang dipakai untuk setiap komputer menggunakan versi yang paling baru sehingga kekurangan yang ada di aplikasi versi yang lama akan ditutup dan diperbaiki. Akan tetapi prosedur ini di KPPBC Bekasi harus dilakukan dengan cara instalasi manual untuk semua komputer di KPPBC Bekasi yang melakukan pelayanan BC 2.5 sehingga memungkinkan jika ada *update* aplikasi yang baru tidak bisa langsung diterapkan sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk mengatasi bahwa penggunaan aplikasi versi terbaru diperlukan dalam pelayanan dan pengawasan sistem BC 2.5 di lingkungan KPPBC Bekasi. Pengubahan data juga menjadi perhatian karena tentunya tidak semua petugas boleh melakukan perubahan data apalagi perubahan tersebut bersifat penting maka perlunya mekanisme untuk mengakomodasikan wewenang pengubahan data untuk sistem aplikasi BC 2.5. Dalam pengendalian keandalan pemrosesan data atas barang larangan dan pembatasan sistem BC 2.5 tidak terhubung secara *realtime online* ke sistem INSW (*Indonesia National Single Window*) karena kode HS (*Harmonized System*) yang memuat barang-barang larangan dan pembatasan serta syarat-syarat dokumen kelengkapannya mungkin saja

berubah-ubah secara cepat mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Apabila sistem BC 2.5 di KPPBC Bekasi dilakukan *update database* secara manual maka tingkat akurasi untuk data barang larangan dan pembatasan akan berkurang karena terdapat jeda waktu antara tanggal peraturan yang berlaku dengan waktu *update database* aplikasi secara manual sehingga dimungkinkan akan terjadinya lolosnya barang dengan tidak dilengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Simpulan, Keterbatasan, Implikasi

5.1. Simpulan

Penggunaan fasilitas Kawasan Berikat oleh perusahaan-perusahaan di wilayah kerja KPPBC Bekasi tidak terlepas dari pelayanan dokumen impor yaitu dengan menggunakan dokumen impor BC 2.5. Dokumen tersebut merupakan dasar perhitungan bea masuk dan PDRI yang dibayarkan oleh perusahaan kawasan berikat yang diharapkan diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan Kawasan Berikat maupun oknum pegawai sehingga penerimaan negara menjadi lebih optimal. Pada umumnya pengendalian internal baik secara pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi dalam penerapan sistem pelayanan impor dokumen BC 2.5 pada KPPBC Bekasi telah dilaksanakan dengan baik. Namun, kelemahan pengendalian internal masih terjadi yang diakibatkan oleh sistem penempatan pegawai yang masih belum optimal, kemampuan pegawai di bagian-bagian yang sangat penting, rekonsiliasi data yang harus dilakukan, jenis program yang tidak menggunakan program *web base*, dan pemutakhiran *database* yang masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan tingkat akurasi data menjadi kurang.

5.2. Keterbatasan

Sistem pengendalian internal untuk penerimaan negara dari bea masuk dalam penelitian ini tidak menggambarkan aktivitas pelayanan KPPBC seluruhnya di Indonesia mengingat setiap KPPBC memiliki karakteristik masing-masing.

5.3. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas berikut merupakan beberapa implikasi atas penelitian ini. Pertama, perlunya pembaharuan aplikasi dengan menyediakan menu *update* langsung dari aplikasi tersebut, jadi ketika ada *update* terbaru setiap komputer atau secara otomatis dapat melakukan pengunduhan secara langsung untuk melakukan pembaharuan terhadap aplikasi sehingga *update* aplikasi tidak dilakukan dengan cara instalasi manual ke setiap komputer. Kedua, dalam pengembangan aplikasi BC 2.5 diharapkan proses transfer data pemberitahuan impor barang BC 2.5 dapat dilakukan secara *online* sehingga akan mengurangi tingkat penyebaran program yang tidak diinginkan seperti virus, malware, trojan melalui media *flashdisk* atau dapat juga dengan meningkatkan pengamanan secara berlapis. Ketiga, penempatan jumlah pegawai yang sesuai dengan kualifikasinya perlu diperhatikan oleh Ditjen Bea Cukai khususnya untuk KPPBC dengan karakteristik tugas dan fungsi yang spesifik.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan objek KPPBC lainya atau instansi Pemerintah lainnya yang memiliki tugas dan fungsi penerimaan negara dengan menguraikan bahasan yang sama ataupun pengembangan dari bahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya penelitian pengendalian internal di bidang penerimaan pada sektor Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, F.I., Daniel, D.R. (2017). Disharmoni sistem informasi akuntansi penerimaan dan piutang dengan

proses bisnis kepabeanaan. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 9(1):20-40.

- Daud, R., Windiana, V.M. (2014). Pengembangan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas berbasis komputer pada perusahaan kecil (studi kasus pada PT Trust Technology). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 12(1): 17-28.
- DJBC (2015). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2015-2019.
- Hayati, S, Kalina, L. (2017). Sistem penerimaan kas atas bea masuk barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 6 (01) : 61-68.
- Kholidah, N.D., Widyawati, D. (2017). Penerapan sistem informasi akuntansi penjualan dalam upaya meningkatkan pengendalian internal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(9): 1-15.
- Romney, M.B., Steinbart, P. J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13 : Cetakan ketiga. Diterjemahkan oleh: Kikin Sakinah, Nur Safira, Novita Puspasari*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simorangkir, D. S., Firmansyah, A. (2017). Evaluasi implementasi peranan pengendalian internal: pelaksanaan impor sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2 (1): 81-98.
- Sukadwilinda, Ratnawati, R.A. (2013). Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan. *Jurnal Asset*, 5 (1): 11-21.
- Yuniati (2017). Pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *STAR-Study & Accounting Research*, XIV (2): 46-61
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.